



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Februari 2013

Halaman: 3

Menyusui Anak Bakal Diatur dengan Perda

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja merancang Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dengan mewajibkan pendirian ruang laktasi di tempat publik, sarana kesehatan, gedung pemerintahan dan swasta.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jogja Tuty Setyowati mengatakan, selain memberikan jaminan hukum, keberadaan Perda pemberian ASI eksklusif mengatur kewajiban pendirian ruang laktasi. Ruang laktasi, kata dia, harus disediakan di tempat publik, sarana kesehatan, pemerin-

tahan maupun swasta. "Ini mengacu pada ketentuan PP 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif," kata Tuty, di kantornya, Senin (18/2).

Raperda juga mewajibkan sarana melahirkan baik rumah sakit maupun klinik untuk memberikan perawatan gabung antara ibu dan bayinya setelah melahirkan. Bayi ditempatkan satu ruangan dengan ibu agar memudahkan proses Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan menyusui. Hingga kini, baru Dinkes dan Puskesmas yang menyediakan sarana tersebut.

"Sarana kesehatan seperti

rumah sakit dan tenaga kesehatan dilarang memberi susu formula pada bayi," terang Tuty.

Diakui Tuty, pemberian ASI eksklusif di Jogja masih rendah. Dari Standar Pelayanan Minimal sebesar 80%, saat ini baru mencapai 46,37% dari total ibu melahirkan sebanyak 4.500 orang pertahun. "Itu juga menjadi satu alasan selain tidak adanya sarana. Angka ibu hamil di Jogja setiap tahun tinggi," jelas Tuty.

Selama 2012, terdapat enam ibu melahirkan meninggal dunia dan angka bayi meninggal 50 bayi. Hal itu disebabkan oleh gagal nafas, sesak nafas

ANGKA ASI EKSKLUSIF MASIH RENDAH...

- Pemberian ASI eksklusif di Jogja masih rendah. Dari Standar Pelayanan Minimal 80%, saat ini baru mencapai 46,37% dari total ibu melahirkan 4.500 orang per tahun.

- Perda ASI Eksklusif mengacu ketentuan PP 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

- Raperda mewajibkan pendirian ruang laktasi di tempat publik, sarana kesehatan, gedung pemerintahan dan swasta.

Sumber: Dinkes Kota Jogja

dan penyakit penyerta DB-HIV. "Masalah rendahnya pemberian ASI Eksklusif tersebut disebabkan berat badan lebih rendah. Ini akibat banyak ibu terkena anemia akibat kekurangan vitamin," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Jogja,

Agus Prasetyo pada penutupan rapat paripurna mengatakan draf Raperda ini akan dibahas Komisi D. "Perda ini salah satu bentuk dukungan Pemkot akan kesehatan generasi penerus. Ini wajib dilakukan," kata Agus. (Abdul Hamied Razak)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005